



PEDAGANG DIIMBAU DAFTAR APLIKASI KLIK SPHP

# TPID Yogya Gerak Cepat Pantau Komoditas Pangan

**YOGYA (KR)** - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Yogya bergerak cepat memantau komoditas pangan di sejumlah wilayah di Kota Yogya. Salah satunya beras yang menjadi komoditas utama pangan bagi masyarakat.

Sekretaris TPID Yogya yang juga Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogya Kadri Renggono, menuturkan dari aspek ketersediaan beras yang dimiliki Bulog menurutnya sangat aman lantaran setiap kementerian rata-rata memiliki cadangan 6,9 ton. Akan tetapi pihaknya juga perlu mengecek secara riil kondisi yang ada di distributor swasta maupun pedagang pasar. "Kita ingin melihat secara utuh bagaimana kondisi di lapangan supaya nanti jika dibutuhkan intervensi dari pemerintah bisa langsung tepat sasaran," tuturnya di sela memantau salah satu gudang beras premium di Jalan Gambiran, Kamis (28/8). Selain di Jalan Gambiran, pe-

mantauan juga dilakukan di gudang bahan pangan di Jalan Pemukti Giwangan. Hasil dari pemantauan tersebut juga bakal disinkronkan dengan kondisi di pasar pantau seperti Pasar Beringharjo, Pasar Kranggan dan Pasar Prawirotaman serta Pasar Demangan. Gerak cepat yang dilakukan TPID Yogya dalam memantau kondisi bahan pangan sekaligus untuk melihat respon di masyarakat atas kebijakan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dari Rp 12.500 menjadi Rp 13.500 per kilogram.

Kadri mengaku, sejauh ini masyarakat tidak terganggu sekaligus kesulitan dalam mendapatkan beras kualitas medium. Namun

demikian, tidak menutup kemungkinan bakal diusulkan operasi pasar bahan pokok di sejumlah pasar pantau. Terutama setelah dilakukan koordinasi bersama Bulog. "Kalau kita lihat kebutuhan beras di Kota Yogya itu mencapai 4.400 ton per bulan. Kebutuhan itu sudah tercukupi. Tetapi untuk beras premium ini juga menjadi perhatian karena stoknya tidak seperti biasanya," urainya.

Ia mencontohkan di gudang beras premium di Jalan Gambiran, kapasitas harian biasanya mencapai 150 ton akan tetapi kini hanya mencapai 20 ton saja. Hal itu wajar lantaran sebagian besar dipasok dari Jawa Timur dan aktivitas penggilingan beras premium banyak yang berhenti. Terutama sebagai antisipasi atas kebijakan pemerintah menyangkut temuan kualitas beras premium yang tidak sesuai standar.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogya Veronica Ambar Ismuwardani, menambahkan beras

menjadi bahan pokok paling utama sehingga akan selalu diupayakan. Hingga saat ini masyarakat juga tidak kesulitan untuk mendapatkan beras sesuai dengan selera masing-masing apakah medium atau premium. Akan tetapi sebagai bentuk pengendalian sekaligus intervensi harga saat ini sudah ada program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras. "Setiap ada kebijakan baru, kami responsif. Termasuk ketika pekan lalu diluncurkan aplikasi Klik SPHP, maka pedagang dan pengecer SPHP Beras langsung kami edukasi," urainya.

Melalui aplikasi tersebut, pedagang dan pengecer yang hendak mendapatkan pasokan SPHP Beras harus melakukan pendaftaran. Sehingga pihaknya bersama Bulog membuka diri bagi pedagang yang belum mendaftarkan aplikasi Klik SPHP.

Sedangkan pemilik salah satu gu-



KR-Ardh Wahdan

**Jajaran TPID Yogya memantau kondisi stok dan kualitas beras di salah satu gudang swasta.**

dag beras premium, Dedy Kusuma, mengaku sejak 18 tahun menggeluti usaha tersebut baru kali ini dirinya merasa cukup berat. Pasalnya pasokan yang diterimanya merosot tajam seiring banyaknya pabrik yang tidak berani beroperasi sembari menunggu kebijakan dari pemerintah. Dampak dari stok yang menipis tersebut berpengaruh pada

omset yang menurun serta penjualan mengalami permasalahan.

"Mudah-mudahan betul jangan sampai terjadi kelangkaan beras premium. Ini harus kita jaga bersama," ujarnya yang selama ini rutin mensuplai kebutuhan beras ke sejumlah hotel, resto, kafe maupun kios-kios. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Perekonomian dan Kerja Sama			

Yogyakarta, 05 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005